

Teuku Riefky Harsya dan Pembangunan Pendidikan di Aceh

Teuku Riefky Harsya and Educational Development in Aceh

***Samhudi¹, Saifuddin Yunus², Abidin Nurdin³**

¹*Magister Sosiologi Universitas Malikussaleh, Aceh Utara*

^{2,3}*Universitas Malikussaleh, Aceh Utara*

*Email: samhudi.190251020006@mhs.unimal.ac.id

Abstract

Teuku Riefky Harsya, a member of the Aceh legislature from 2005-2024, has played a role in the development of education in Aceh. This article aims to explain two problems: Teuku Riefky Harsya's contribution to the development of education in Aceh and the political strategies used. The results showed that Teuku Rifky Harsya contributed to the development of education in Aceh, including the Smart Indonesia Program, Bidikmisi, Superior Scholarship, Infrastructure, Mobile library, and mobile cinema, healthy food for school children. Strategies for building education in Aceh are cross-party political communication, closeness with the ulama, teamwork, and forming field coordinators. Thus, education development in Aceh can continue to increase and benefit to the community.

Keywords: *Contribution, Strategy, Education Development, legislature*

Abstrak

Teuku Riefky Harsya yang merupakan anggota legislatif Aceh dari tahun 2005-2024 yang telah berperan dalam pembangunan Pendidikan di Aceh. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dua masalah yaitu; kontribusi Teuku Riefky Harsya dalam pembangunan pendidikan di Aceh dan strategi politik yang dipergunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teuku Rifky Harsya memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan di Aceh, antara lain: Program Indonesia Pintar, Bidikmisi, Beasiswa Unggul, Sarana Prasarana, Mobil perpustakaan dan bioskop keliling, makanan sehat untuk anak sekolah. Strategi dalam membangun pendidikan di Aceh yaitu komunikasi politik lintas partai, kedekatan dengan ulama, kerja sama tim dan membentuk koordinator lapangan. Sehingga dengan demikian pembangunan pendidikan di Aceh dapat terus meningkat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Kontribusi, Strategi, Pengembangan Pendidikan, Anggota DPR-RI*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam mengelola pemerintahan. Pada sistem demokrasi, tidak semua pendapat masyarakat akan diterima oleh pemerintah sehingga berlakulah sistem perwakilan rakyat dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di isi oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya dalam suatu pesta demokrasi. Lembaga ini kemudian menjadi media perwakilan untuk menyampaikan semua aspirasi masyarakat. (Yusuf 2019).

DPR terdiri atas anggota partai politik yang menjadi lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi tersebut dijalankan sebagai representasi masyarakat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan program nasional (Undang-Undang Republik Indonesia 2014). Melalui DPR, setiap pengusulan aturan yang diajukan oleh pemerintahan pusat mengharuskan untuk mendapat persetujuan oleh Dewan perwakilan Rakyat. Demikian pula dengan rancangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan perwakilan rakyat di setiap provinsi dan Dapil yang ada di Indonesia. Di Aceh, ada 2 Dapil yang menjadi representasi legislatif untuk perwakilan pusat yaitu Dapil 1 yang mewakili 15 Kabupaten/Kota: Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Nagan raya, Aceh Barat, Simeulu, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil, Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Kemudian Dapil 2 yang mewakili Kabupaten/kota: Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Tengah.

Dari Dapil 1 Aceh, terdapat salah seorang satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu Teuku Riefky Harsya yang sudah menduduki parlemen selama 4 periode dan sudah 18 tahun menjadi anggota

DPR RI. Pada periode pertama Teuku Riefky Harsya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan Prof. Rusli Ramly yang meninggal dunia pada tahun 2005, Teuku Riefky Harsya melanjutkan untuk memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan Dapil 1 Aceh di 15 kabupaten /Kota dengan jumlah 176 Kecamatan dan 33.626 Desa.

Sebagai legislator asal Aceh, Teuku Riefky Harsya terus berupaya untuk meneruskan aspirasi masyarakat Aceh dengan mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah di Aceh, terutama program pembangunan pendidikan. Teuku Riefky Harsya telah melakukan berbagai hal untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan di Aceh. Hal ini dilakukan karena Aceh merupakan daerah bekas arena konflik yang membuat pendidikan masyarakatnya sempat terhambat. Konflik secara langsung telah berdampak pada dinamika Pendidikan di Aceh, Infrastruktur pendidikan hancur, jam sekolah dibatasi, bayang-bayang konflik dan kekerasan selalu menghantui sehingga pendidikan yang diterima tidak memadai masyarakat jauh dari kata memadai (Amin 2018; Ikramatoun et al. 2021). Oleh karena itu perhatian terhadap Pendidikan merupakan hal yang paling dan menjadi salah satu tanggung jawab para legislator yang telah menjadi penyambung lidah rakyat. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran dan strategi Teuku Riefky Harsya sebagai seorang legislator dalam membangun pendidikan di Aceh.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada beberapa pihak terkait, terutama kepada Teuku Riefky Harsya sebagai legislator dan beberapa stakeholder pendidikan di lainnya yang ada di Aceh. Data wawancara yang diperoleh kemudian di analisis dan disajikan secara

deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai peran dan strategi yang dilakukan untuk mendorong pembangunan pendidikan di Aceh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kontribusi Teuku Riefky Harsya dalam Pembangunan Pendidikan di Aceh

Pembangunan adalah semua upaya yang dilakukan dan direncanakan untuk melaksanakan perubahan yang dimiliki tujuan utama memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia (Amin 2018). Dalam konteks pembangunan pendidikan, kolaborasi dan dukungan dari pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menurunkan ketertinggalan pembangunan Pendidikan di Aceh, selain program dari pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota sangat berpengaruh besar terhadap pengembangan Pendidikan di Aceh. Teuku Riefky Harsya menyatakan.

“Perlu peran serta berbagai pihak dalam mendukung pendidikan di Aceh, yang sudah melalui masa konflik yang perlu percepatan untuk mengejar ketertinggalan terkait dengan generasi muda di Aceh. Peran provinsi, kabupaten kota serta dukungan dari pemerintahan pusat perlu sinergitas yang baik” (wawancara, 30 Juli 2021).

Sebagai anggota di DPR-RI Teuku Riefky Harsya telah melaksanakan tugas dan perannya sebagai wakil rakyat. Karena itu sejak 2014 sampai 2021 Teuku Riefky Harsya telah mengusulkan 167.868 beasiswa untuk siswa berbagai tingkatan sekolah dari SD, SMP, SMA dan SLB negeri dan swasta di setiap Kabupaten/Kota Dapil 1 Aceh, Beasiswa Unggulan dan Bidikmisi 555 Mahasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Program beasiswa menjadi program usulan tahunan yang di turunkan dari kementerian untuk siswa yang ada di Aceh (Laporan Program Teuku Riefky Harsya 2014-2021).

Melalui beragam program yang telah direncanakan, Teuku Riefky Harsya terus berupaya untuk merealisasikan aspirasi masyarakat Aceh dari tahun 2014-2020. Ia telah membawa program usulan pembangunan pendidikan didaerah pemilihan Dapil I Aceh. Berikut ini beberapa program yang telah berhasil diperjuangkan dan di realisasikan oleh Teuku Riefky Harsya kepada masyarakat

Aceh yang kemudian menjadi kontribusi penting untuk pembangunan pendidikan di Aceh:

a) Beasiswa Program Indonesia Pintar

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan salah satu Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) (Petunjuk Teknis PIP 2015).

Melalui program ini, Teuku Riefky Harsya melalui pemerintah memperjuangkan agar masyarakat Aceh mendapatkan kuota maksimal sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Aidil Mashendra menjelaskan:

“Program Indonesia Pintar yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya selalu mendapatkan kuota usulan setiap tahunnya, dari tahun 2014-2020 Teuku Riefky Harsya telah mengusulkan 239.503 siswa di Aceh khususnya di dapil 1 Aceh (wawancara, 30 Juli 2021).

Setelah pengusulan beasiswa Program Indonesia Pintar oleh Teuku Riefky Harsya untuk tahap seleksi akan dilakukan oleh Kementerian Langsung dengan syarat dan ketentuan aturan yang ada di kementerian dengan berpedoman pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Tim Rumoh Aspirasi melakukan sosialisasi beasiswa Program Indonesia Pintar dan penyerahan SK penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar yang diterima dan tidak diterima supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam sosialisasi Beasiswa Tim Rumoh Aspirasi juga menggunakan media sosial untuk bisa diakses oleh masyarakat Aceh terhadap sosialisasi Beasiswa Program Indonesia Pintar sebagai berikut: Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, TVRI dan media berita.

b) Bidik Misi dan Beasiswa Unggulan

Bidik Misi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi, dan Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Program Beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan sebuah dukungan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Program ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperkecil kesenjangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia (Juknis Beasiswa Unggulan)

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan di paragraf 2 Pemenuhan Hak Mahasiswa Pasal 76 yaitu: 1. Pemerintah, pemerintah daerah dan /atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. 2. Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; b. Bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau, c. Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. 3. Perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya (UU RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

Sejak periode 2014-2020, melalui program ini Teuku Riefky Harsya telah berusaha memperjuangkan agar Masyarakat Aceh dapat menikmatinya. Hingga saat ini ia telah berhasil memperjuangkan program ini untuk masyarakat Aceh. 555 mahasiswa berprestasi dan tidak mampu telah mendapatkan bantuan dari program ini. Kemudian ia juga telah berhasil memperjuangkan Bantuan Sarana Prasarana di berbagai kampus di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Serambi Mekkah, Universitas Bina Bangsa Getsampena, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Perguruan Tinggi Al-Wasliyah Banda Aceh, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu Aceh, Universitas Malikussaleh, Universitas Teuku Umar dan Universitas Al-Muslim Bireuen.

c) Sarana Prasarana Pendidikan

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung (Yuni Listyowati 2009). Dalam konteks sarana dan prasarana pendidikan, Teuku Riefky Harsya telah berhasil memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dari tahun 2014-2020 yang berjumlah 1.404 program di 765 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Pembangunan ini berupa pembangunan unit sekolah baru, revitalisasi, ruang kelas baru, rehab ruang belajar, perpustakaan dan ruang penunjang sekolah lainnya.

d) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan. Dalam program ini, Teuku Riefky Harsya berhasil memperjuangkan bantuan untuk PAUD dengan jumlah 855 program yang berupa alat permainan edukasi, rehab gedung pendidikan anak usia dini, program kecakapan keluarga dan program kecakapan wira usaha.

e) Mobil Perpustakaan dan Bioskop Keliling

Perpustakaan keliling adalah bagian dari pelayanan perpustakaan umum daerah yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan mobil. Dengan kata lain, perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan perpustakaan untuk melayani

masyarakat dari satu tempat ke tempat lain yang belum terjangkau oleh perpustakaan umum.

Teuku Riefky Harsya membantu melalui usulannya menyerahkan 4 Mobil perpustakaan keliling dari Perpustakaan Nasional kepada pemerintahan Kota Banda Aceh, Pidie, Nagan Raya dan Aceh Selatan. Penyerahan mobil perpustakaan dan bioskop keliling untuk melakukan pemberdayaan perpustakaan dan gemar membaca untuk meningkatkan sumber daya manusia di Aceh.

f) Makanan Sehat Bagi Anak Sekolah

Makanan sehat adalah makanan yang memiliki nutrisi yang beragam dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk mengonsumsi makanan bergizi merupakan hal yang sangat penting pada ibu hamil dan masa pertumbuhan anak, Teuku Riefky Harsya membagikan makanan sehat yang memiliki kandungan nutrisi untuk mencukupi asupan gizi untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan anak sekolah sejumlah 32 Ton.

2. Strategi dalam memperjuangkan program pembangunan pendidikan

Strategi suatu perencanaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau suatu rencana yang mengarahkan pada suatu perubahan yang sudah ditentukan. Pada tataran implementasinya, kecakapan dan sumber daya suatu organisasi sangat diperlukan agar strategi yang telah direncanakan dapat mencapai sasarannya (Wahyuni 2021). Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, berikut ini beberapa strategi yang telah berhasil dimainkan oleh Teuku Riefky Harsya dalam memperjuangkan pembangunan pendidikan di Dapil 1 Aceh.

a) Komunikasi Politik Lintas Partai

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Partai politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya

memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu.

Komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik (Indrawan 2017). Komunikasi politik memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Komunikasi politik diasumsikan sebagai yang menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan semua kegiatan sistem politik, baik masa kini maupun masa lampau, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijakan (Amin, Nazaruddin, and Akmal 2020; Chumaeson 2021).

Meskipun perbedaan-perbedaan ideologi muncul di antara partai-partai politik, dalam praktik demokrasi modern mereka memiliki komitmen yang sama untuk menempuh cara-cara konstitusional dalam memperjuangkan tujuan-tujuan bersama, Teuku Riefky Harsya menjelaskan:

“Komunikasi lintas politik bukan saja menjembatani perbedaan pandangan yang muncul, akan tetapi menyatukan energi positif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar bangsa. Komunikasi politik antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan antar Partai Politik saling bekerja sama dalam membangun walaupun berbeda partai akan tetapi tetap memperjuangkan kepentingan masing-masing” (Wawancara, 30 Juli 2021).

Walaupun Teuku Riefky Harsya menduduki di Komisi I akan tetapi memiliki kepercayaan dan kerja sama dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat lain maupun dari partai yang berbeda untuk mendapatkan program dari Komisi X yaitu program pendidikan yang diusulkan untuk masyarakat di Aceh. Selain itu Teuku Riefky Harsya juga memiliki pengaruh besar terhadap partai politik yang dipercayakan sebagai Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Pusat Partai Demokrat, oleh karena itu komunikasi politik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, komisi dan partai politik lain. Teuku Riefky Harsya melakukan komunikasi politik yang bertujuan untuk pembangunan pendidikan di Aceh sekaligus akan berpengaruh pada nama baik partai didaerah.

Strategi yang digunakan dalam mempertahankan program adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan gagasan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu, dalam strategi yang baik terdapat, memiliki tema, koordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan secara efisien dalam pendanaan, pelaksanaan gagasan secara rasional, dan memiliki tujuan dengan menggunakan taktik secara efektif berkomunikasi dengan satu partai dan lintas partai.

Pentingnya komunikasi politik untuk membangun *image* politik tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi politik. Komunikasi politik yang dimaksud dalam ini adalah semua hal yang dilakukan oleh partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat. Sistem komunikasi politik dibangun dalam usaha mengelola pesan dalam menjalankan pemerintahan termasuk juga dalam memperoleh kekuasaan. Sehingga dalam perspektif komunikasi politik salah satu unsur penting dalam struktur komunikasi adalah pesan komunikasi (Tazri 2019).

Komunikasi politik yang dilakukan Teuku Riefky Harsya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mempertahankan program pendidikan untuk dibawa pulang ke Aceh tidak hanya dengan sesama Partai Demokrat saja, akan tetapi juga ada komunikasi dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia partai lain seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS). Perbedaan komisi di dalam parlemen akan menjadi penguat sesama dalam menjalankan tugas, selain itu juga memiliki kepentingan bersama dalam menjalankan fungsi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Aidil Mashendra juga menyatakan.

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan memiliki peran tersendiri dalam pembagian komisi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membantu pemerintahan dalam mengontrol program yang dilaksanakan di setiap

daerah, oleh karena itu komunikasi yang baik akan bisa membantu mengontrol dan membangun daerah pemilihan, akan tetapi apa bila seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menduduki dikomisi tertentu akan tetapi komunikasinya masih terbatas itu sangat berpengaruh terhadap program yang didapatinya sesuai dengan pembangunan daerah pemilihan". (Wawancara 25 Juli 2021)

Komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, partai dan kementerian itu akan sangat pengaruh terhadap hak usulan yang didapatkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperjuangkan program pembangunan didaerah. Proses komunikasi yang mencoba membangun pemahaman bersama akan suatu hal. Komunikasi dalam hal ini melibatkan dua pihak atau lebih. Tujuan utama komunikasi bukan sekedar memberikan data atau informasi kepada pihak lain, tetapi lebih dari itu berusaha membangun pemahaman bersama kedua belah pihak memiliki persepsi yang sama.

b) Kedekatan dengan Ulama

Ulama adalah pemuka atau pemimpin agama Islam yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah syariah. Ulama memegang peranan penting dalam suatu Negara, keberadaannya selalu menjadi rujukan untuk dimintai pendapatnya, di Indonesia budaya sowan sudah biasa dilakukan oleh pejabat negara ataupun pimpinan partai. Dalam konteks Aceh, Ulama merupakan salah satu sentral yang telah memainkan beragam posisi penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh (Amiruddin 2003; Kamaruzzaman 2016; Sahlan, Amin, et al. 2019; Sahlan, Fajarni, et al. 2019).

Dalam realitas ulama memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan politik, tidak jarang penurunan dan pengangkatan seorang pemimpin berada ditangan para ulama. Secara umum, 4 peran strategis ulama antara lain: 1. Sebagai sumber kekuatan moral spiritual, 2. Sebagai agen sosialisasi Islam 3. Sebagai pelapor pembaharuan Islam, sebagai sumber kekuatan ikatan solidaritas umat (Abdul Wahid 2013). Kedekatan Teuku Riefky Harsya dengan Ulama sudah lama dan sudah ada kedekatan sebelumnya

dengan beberapa ulama di Aceh. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Aidil Mashendra menjelaskan.

“Sebelum Teuku Riefky Harsya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ketika beliau mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil 1 Aceh orang tua Teuku Riefky Harsya mengamankan untuk menjumpai ulama Aceh terlebih dahulu untuk silaturahmi dan meminta restu dan dukungan kepada Ulama atau para pemuka Agama di Aceh yaitu kepada Waled Husaini, Khalidin Lhong dan Tgk Bulqaini Tanjung. Ketika Teuku Riefky Harsya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan selalu melakukan silaturahmi dengan Ulama ketika pulang ke Aceh, setiap kegiatan di Aceh atau pertemuan masalah menampung aspirasi rakyat Teuku Riefky Harsya selalu mengundang ulama di setiap daerah untuk pertemuannya. (Wawancara 08 Desember 2021).

Teuku Riefky Harsya mengundang 114 Ulama Aceh yang berasal dari 23 Kabupaten/Kota hadir dalam silaturahmi bersama Presiden Republik Indonesia Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Banda Aceh, pertemuan ini merupakan permintaan dari Susilo Bambang Yudhoyono, Teuku Riefky Harsya menjadi penghubung dari pertemuan dalam rangkaian silaturahmi SBY dengan ulama Aceh di 23 kabupaten/kota (AntaraNews 2019; Melani 2019). Begitu juga pada tahun 2019 Teuku Riefky Harsya juga menjadi penghubung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan ulama Aceh, ketika Safari Ramadhan Silaturahmi di Dayah Mudi Mesra, “Kami adalah partai yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan religiositas Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*. Partai kami adalah partai nasionalis tetapi ingin selalu menyatukan antara nilai-nilai keagamaan Islam dengan nilai-nilai kebangsaan nasionalisme, Kehadiran kami bertemu, dan bersilaturahmi dengan para ulama, diharapkan dapat membuahakan upaya bersama dalam menebar kebaikan dan memperjuangkan harapan rakyat (Republika 2022).

Tidak hanya dalam pertemuan silaturahmi besar saja Teuku Riefky Harsya bertemu dengan ulama akan tetapi juga ada mengunjungi dayah/pesantren yang di dapil I dalam menyerap aspirasi ulama dalam membantu pembangunan pendidikan di dayah/pesantren. Di setiap dayah terpadu yang memiliki sekolah di bawah Kemendikbud Teuku Riefky Harsya

.....

juga memberi kuota beasiswa Program Indonesia Pintar di setiap dayah terpadu di Dapil I Aceh.

Di periode 2019-2024 berada di Komisi 1 membidangi pertahanan, luar negeri dan informasi yang tidak berkaitan dengan pendidikan, yang kami lakukan menjaga komunikasi dengan Komisi X dan mitranya yaitu dengan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, dalam artian ada kepentingan masing-masing yang dijaga antara Teuku Riefky Harsya pimpinan di Komisi 1 dan Komisi X dari Partai Demokrat maupun dari partai lainnya. Dengan adanya posisi yang strategis di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Pimpinan Komisi I memiliki peluang besar dalam proses loby dalam mempertahankan program pendidikan Aceh dan mengawal sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu Teuku Riefky Harsya memiliki bantuan dari Tim disetiap 15 Kabupaten/Kota dan Tim Rumoh Aspirasi Teuku Riefky Harsya di Banda Aceh untuk menampung aspirasi masyarakat untuk menghubungkan dan mengusulkan ke Kementerian atau Lembaga di pusat, ada beberapa dayah terpadu yang memiliki sekolah dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dibantu usulkan beasiswa oleh Teuku Riefky Harsya. Pada kesempatan tersebut Pimpinan Yayasan juga menyampaikan Apresiasi terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) Yang telah membantu pendidikan siswa/santri di sekolah di Dayah Mabdaul Ulum Al Aziziyah Banda Aceh Pimpinan Yayasan menyatakan.

“Terima kasih Teuku Riefky Harsya atas usulan beasiswa Program Indonesia Pintar untuk Aceh, Investasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat dan seharusnya menjadi prioritas kita bersama, pendidikan yang baik akan menjadi bekal penting bagi anak, Insya Allah Generasi Aceh mendatang bukanlah Generasi yang lemah, Harapan kami semoga penerima beasiswa ini ditingkatkan lagi kedepannya, mengingat masih banyak santri yang kurang mampu, dan kami juga berterima kasih atas bantuannya yang telah membantu meringankan beban para orang tua santri”(Wawancara, Tanggal 06 Januari 2022).

Kedekatan Teuku Riefky Harsya dengan ulama juga memberi program beasiswa terhadap dayah atau pesantren terpadu yang memiliki sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ada di Aceh. Begitu juga di SMK Hidayatul Anam di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan yang pernah mendapatkan bantuan usulan beasiswa oleh Teuku Riefky Harsya yang merupakan Dayah terpadu yang memiliki sekolah di bawah Pimpinan Dayah Abi Khairuddin.

c) Kerjasama Tim (Rumoh Aspirasi)

Kerja sama dalam suatu tim merupakan keunggulan kompetitif yang tertinggi dalam suatu organisasi. Bahkan ada yang menggambarkan kekuatan suatu tim. Kerja sama tim atau kelompok merupakan cara untuk menguasai beberapa perilaku anggota atau orang-orang dalam suatu organisasi yang tidak sama (Setiani 2012) Kerja sama sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya kerja sama sehingga banyak orang menganggap merupakan bentuk interaksi sosial yang penting dan utama.

Sistem pengelolaan program dan instruksi satu arah yang dilakukan oleh Teuku Riefky Harsya untuk menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui kerja sama Tim menggunakan sistem satu pintu, supaya terealisasinya program dan menyentuh masyarakat secara langsung. Beberapa pembagian tugas Tim membantu Teuku Riefky Harsya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat: Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (MD3) Pasal 41 ayat 1 dicantumkan bahwa: Tenaga Ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat dan tenaga ahli fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dan fraksi. Tenaga ahli mendukung kerja-kerja politik antara lain, otonomi, mobilitas, aturan regulasi, dan komitmen (Permana and Adaba 2016).

Demikian juga dibentuk Rumah aspirasi yang merupakan sebuah wadah di mana anggota dewan dapat berkomunikasi dengan konstituennya di daerah, fungsi rumah aspirasi anggota dewan dapat lebih intens menjalankan sebagai wakil rakyat. Dalam mengelola aspirasi masyarakat Teuku Riefky Harsya memiliki Rumoh Aspirasi TRH untuk mengelola aspirasi di daerah pemilihan yang beralamat di Jln. Tengku Munira Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Rumoh Aspirasi TRH yang dikelola langsung oleh Tim Inti dari Teuku Riefky Harsya yang diketua oleh Aidil Mashendra dan juga sekaligus Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Ismi dan Bendahara Rahmat Hidayat.

Rumoh Aspirasi TRH dikelola secara struktural yang memiliki kepengurusan dalam mengelola Tim dari Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota di seluruh Dapil 1 Aceh. Selain itu fungsi dari Rumoh Aspirasi TRH mengelola seluruh program yang di bawa pulang dari pusat ke daerah untuk didistribusikan ke masyarakat daerah pemilihan. Setiap ada program dari pusat selalu komunikasi ke daerah melalui Rumoh Aspirasi TRH dan menyebar ke tim daerah Kabupaten/Kota.

Dalam struktural Tim Rumoh Aspirasi TRH selain ketua, sekretaris dan bendahara juga memiliki Koordinator Provinsi yang mengelola program dan menginstruksikan ke daerah, Koordinator Provinsi yang mengelola 15 Kabupaten Kota dan membagi tugas dibentuk 2 orang koordinator yaitu Jasmar dan Khairul Bahri, kedua koordinator merupakan tokoh mahasiswa pada masanya. Dalam pengelolaan dan menjaga komunikasi dengan tim, Khairul Bahri mengelola Kabupaten/kota: Pidie, Pidie jaya, Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan Aceh jaya. Sedangkan Jasmar berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota: Aceh Barat, Nagan raya Simeulue, Abdya, Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil, Aceh Tenggara dan Gayo Lues.

Komunikasi antara tim pusat dan tim provinsi tidak terputus dalam mengelola komunikasi, setiap koordinasi yang dilakukan menggunakan sistem satu arah dan mendapatkan hasil pengabdian yang tepat sasaran. Setiap

.....

kabupaten kota Teuku Riefky Harsya memiliki ketua tim Kabupaten/kota yang diarahkan oleh ketua tim Rumoh Aspirasi melalui Koordinator Provinsi. Setiap ada program instruksi dari pusat untuk mencari penerima manfaat tim kabupaten kota, kecamatan dan Gampong sangat berpengaruh, karena yang lebih mengetahui keadaan daerah hanya tim daerah itu sendiri.

D. Penutup

Teuku Riefky Harsya sebagai anggota legislatif dari Dapil 1 Aceh telah berhasil memperjuangkan dan mendorong pembangunan pendidikan di Aceh melalui beberapa program. Kajian ini telah mengidentifikasi beberapa program pembangunan pendidikan untuk Aceh yaitu beberapa program beasiswa untuk masyarakat Aceh dan program sarana dan prasarana pendidikan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mendorong dan mempertahankan program pembangunan pendidikan di Aceh sebagaimana disebutkan di atas, Ia melakukan komunikasi politik dengan baik, menjaga komunikasi dengan Ulama dan membangun kerjasama tim yang solid dari tingkatan Provinsi, Kecamatan dan Desa.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid. 2013. "Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh." *Madania* 17(1):85-92.
- Amin, Khairul. 2018. "Pengaruh Konflik Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Aceh." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1(2):159-76. doi: 10.31538/nzh.v1i2.45.
- Amin, Khairul, Nazaruddin, and M. Akmal. 2020. "Kontestasi Politik Pada Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan)." *Jurnal Wacana Politik* 5(2):149-63.
- Amiruddin, M. Hasbi. 2003. *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation.
- AntaraNews. 2019. "Riefky Harsya: Sebanyak 114 Ulama Aceh Hadiri Silaturahmi Bersama SBY." Retrieved June 23, 2022 (<https://aceh.antaraneews.com/berita/55110/riefky-harsya-sebanyak-114-ulama-aceh-hadiri-silaturahmi-bersama-sby>).
- Chumaeson, Wahyuning. 2021. "STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK GKR AYU KOES INDRIYAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD RI) DAPIL JAWA TENGAH PERIODE 2014-2019" *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 03(01):10-17.
- Ikramatoun, Siti, Khairul Amin, Darwin Darwin, and Halik Halik. 2021. "Iron Cage Birokrasi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 6(1):18. doi: 10.17977/um021v6i1p18-29.
- Indrawan, Raden Mas Jerry. 2017. "DAMPAK KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT." *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16(2):171. doi: 10.32509/wacana.v16i2.14.
- Kamaruzzaman, Kamaruzzaman. 2016. "Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16(2). doi: 10.21154/al-tahrir.v16i2.494.
- Kemdikbud. 2021. "Beasiswa Unggulan - Puslapdik." 4-7.
- Kemenag. 2020. "UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi." 32.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2015. "PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHUN." *Petunjuk Teknis*.
- Listyowati, Yuni. 2009. "Analisis Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD Dan SMP Di Kabupaten Sukoharjo."
- Melani. 2019. "Teuku Riefky Harsya Sampaikan Terima Kasih Ke Ulama Aceh | Kasadar.Com." *Kasadar.Com*. Retrieved June 23, 2022 (<https://www.kasadar.com/teuku-riefky-harsya-sampaikan-terima-kasih>).

ke-ulama-aceh).

- Permana, Yogi Setya, and Pandu Yuhsina Adaba. 2016. "Menelisik Peran Tenaga Ahli Anggota Legislatif." *Jurnal Penelitian Politik* 8(1):12.
- Republika. 2022. "AHY Safari Ramadhan 1443 H Ke Provinsi Aceh Bertemu Ulama." Retrieved June 23, 2022 (<https://www.republika.co.id/berita/ragw9r484/ahy-safari-ramadhan-1443-h-ke-provinsi-aceh-bertemu-ulama>).
- Sahlan, Muhammad, Khairul Amin, Ade Ikhsan Kamil, and Iromi Ilham. 2019. "Ulama: Roh Kebudayaan Untuk Rekonsiliasi Di Aceh." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 13(2). doi: 10.24815/jsu.v13i2.18460.
- Sahlan, Muhammad, Suci Fajarni, Siti Ikramatoun, Ade Ikhsan Kamil, and Iromi Ilham. 2019. "The Roles of Ulama in the Process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh." *Society* 7(2):251-67. doi: 10.33019/society.v7i2.106.
- Setiani, Sri. 2012. "Membangun Kerja Sama Tim (Kelompok)." *Jurnal Stie Semarang* 4(3):32.
- Tazri, M. 2019. "Politik Hujat Dalam Sistem Komunikasi Politik Indonesia (Studi Fenomenologi Cebong-Kampret)." *Jurnal Communiverse (CMV)* 4(2):9-15.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM* 15(2):1-56.
- Yusuf, Muh. 2019. "FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA LEGISLATION." *Clavia : Journal Of Law* 17(1):41-54.